

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Kehumasan Dan Protokoler Pemerintahan*
KODE MK	:	3PBIP4112
SEMESTER	:	6

Tim Penyusun:

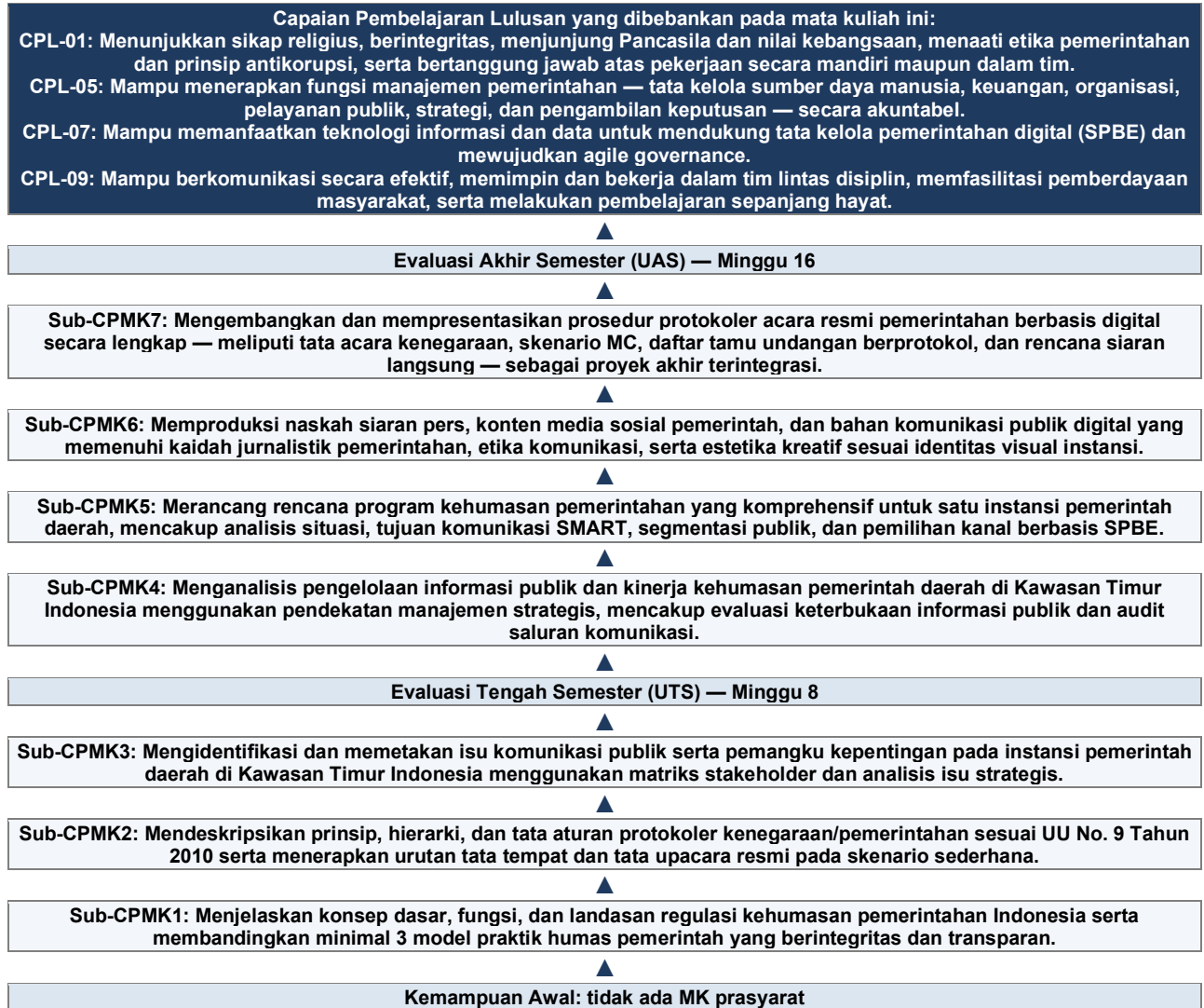
Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3PBIP4112	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kehumasan Dan Protokoler Pemerintahan*		3PBIP4112	MKPP	T=3	P=0	6	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom. NIDN. 0928068903	 Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom. NIDN. 0928068903		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.					
	CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.					
	CPL-07	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital (SPBE) dan mewujudkan agile governance.					
	CPL-09	Mampu berkomunikasi secara efektif, memimpin dan bekerja dalam tim lintas disiplin, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembelajaran sepanjang hayat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan peran kehumasan pemerintahan serta protokoler dalam tata kelola komunikasi publik yang berintegritas, transparan, dan antikorupsi sesuai regulasi kehumasan Indonesia.					
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan komunikasi publik dan keprotokolan pemerintahan daerah — khususnya di konteks Kawasan Timur Indonesia — menggunakan pendekatan manajemen strategis kehumasan, mencakup identifikasi isu, pemetaan pemangku kepentingan, dan evaluasi pengelolaan informasi publik secara akuntabel.						

	CPMK3	Mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi kehumasan pemerintahan dan prosedur protokoler acara resmi berbasis digital (SPBE) — meliputi rencana program humas, naskah siaran pers, tata acara kenegaraan, dan konten media pemerintah — yang mencerminkan nilai integritas, kreativitas, dan semangat pelayanan publik.																																						
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																							
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan landasan regulasi kehumasan pemerintahan Indonesia serta membandingkan minimal 3 model praktik humas pemerintah yang berintegritas dan transparan.																																						
	Sub-CPMK2	Mendeskripsikan prinsip, hierarki, dan tata aturan protokoler kenegaraan/pemerintahan sesuai UU No. 9 Tahun 2010 serta menerapkan urutan tata tempat dan tata upacara resmi pada skenario sederhana.																																						
	Sub-CPMK3	Mengidentifikasi dan memetakan isu komunikasi publik serta pemangku kepentingan pada instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan matriks stakeholder dan analisis isu strategis.																																						
	Sub-CPMK4	Menganalisis pengelolaan informasi publik dan kinerja kehumasan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan pendekatan manajemen strategis, mencakup evaluasi keterbukaan informasi publik dan audit saluran komunikasi.																																						
	Sub-CPMK5	Merancang rencana program kehumasan pemerintahan yang komprehensif untuk satu instansi pemerintah daerah, mencakup analisis situasi, tujuan komunikasi SMART, segmentasi publik, dan pemilihan kanal berbasis SPBE.																																						
	Sub-CPMK6	Memproduksi naskah siaran pers, konten media sosial pemerintah, dan bahan komunikasi publik digital yang memenuhi kaidah jurnalistik pemerintahan, etika komunikasi, serta estetika kreatif sesuai identitas visual instansi.																																						
	Sub-CPMK7	Mengembangkan dan mempresentasikan prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berbasis digital secara lengkap — meliputi tata acara kenegaraan, skenario MC, daftar tamu undangan berprotokol, dan rencana siaran langsung — sebagai proyek akhir terintegrasi.																																						
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK																																							
	<table><tr><td></td><td>CPMK1</td><td>CPMK2</td><td>CPMK3</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>√</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>					CPMK1	CPMK2	CPMK3	Sub-CPMK1	√	—	—	Sub-CPMK2	√	—	—	Sub-CPMK3	—	√	—	Sub-CPMK4	—	√	—	Sub-CPMK5	—	—	√	Sub-CPMK6	—	—	√	Sub-CPMK7	—	—	√	Jumlah	2	2	3
	CPMK1	CPMK2	CPMK3																																					
Sub-CPMK1	√	—	—																																					
Sub-CPMK2	√	—	—																																					
Sub-CPMK3	—	√	—																																					
Sub-CPMK4	—	√	—																																					
Sub-CPMK5	—	—	√																																					
Sub-CPMK6	—	—	√																																					
Sub-CPMK7	—	—	√																																					
Jumlah	2	2	3																																					
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																							

	<table><tr><th></th><th>CPL-01 (%)</th><th>CPL-05 (%)</th><th>CPL-07 (%)</th><th>CPL-09 (%)</th><th>Bobot penilaian (%)</th><th>Jumlah Minggu</th></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>8</td><td></td><td></td><td>7</td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td></td><td>7</td><td></td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td></td><td>4</td><td></td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>8</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>22</td><td>3</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>33</td><td>28</td><td>15</td><td>24</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>		CPL-01 (%)	CPL-05 (%)	CPL-07 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	8			7	15	2	Sub-CPMK2	7			7	14	2	Sub-CPMK3		7		7	14	2	Sub-CPMK4		4		3	7	1	Sub-CPMK5	5	5	4		14	2	Sub-CPMK6	8	7	7		22	3	Sub-CPMK7	5	5	4		14	2		33	28	15	24	100	14
	CPL-01 (%)	CPL-05 (%)	CPL-07 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																										
Sub-CPMK1	8			7	15	2																																																										
Sub-CPMK2	7			7	14	2																																																										
Sub-CPMK3		7		7	14	2																																																										
Sub-CPMK4		4		3	7	1																																																										
Sub-CPMK5	5	5	4		14	2																																																										
Sub-CPMK6	8	7	7		22	3																																																										
Sub-CPMK7	5	5	4		14	2																																																										
	33	28	15	24	100	14																																																										
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kehumasan dan Protokoler Pemerintahan (3 SKS) membahas konsep, fungsi, dan praktik kehumasan serta keprotokolan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, dengan penekanan khusus pada dinamika komunikasi publik di lingkungan pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia. Dalam struktur kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan UNISAN, mata kuliah ini berperan sebagai mata kuliah keahlian yang mengintegrasikan kompetensi manajemen strategis, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai wahana pelayanan publik yang responsif dan adaptif. Melalui pendekatan Project-Based Learning dan Case-Based Learning sesuai SN-Dikti Pasal 14 dan KPT 2024, mahasiswa secara progresif bergerak dari penguasaan konsep dan analisis permasalahan komunikasi publik hingga perancangan strategi kehumasan dan prosedur protokoler acara resmi pemerintahan yang mencerminkan nilai Integrity, Creativity, dan Service. Relevansi mata kuliah ini terhadap CPL yang dibebankan terwujud melalui kemampuan mahasiswa menganalisis isu komunikasi dan pemetaan pemangku kepentingan (CPL-05, CPL-09), merancang program humas, siaran pers, tata acara kenegaraan, serta konten media digital pemerintah (CPL-07, CPL-09), dan menginternalisasi prinsip antikorupsi serta etika kehumasan pemerintahan dalam setiap produk kerja yang dihasilkan (CPL-01).																																																															
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar kehumasan pemerintahan; 2. Fungsi & peran humas dalam tata kelola publik; 3. Regulasi kehumasan dan keprotokolan Indonesia; 4. Etika komunikasi & integritas aparatur humas; 5. Manajemen strategis komunikasi pemerintahan; 6. Analisis isu dan pemetaan pemangku kepentingan; 7. Pengelolaan informasi publik yang akuntabel; 8. Keprotokolan acara resmi & kenegaraan; 9. Perancangan program dan rencana kerja humas; 10. Penulisan siaran pers & konten media pemerintah; 11. Kehumasan digital berbasis SPBE; 12. Studi kasus kehumasan Kawasan Timur Indonesia.																																																															

Pustaka		Utama :					
		(1) Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). Effective Public Relations. Edisi ke-9. Pearson Prentice Hall; (2) Regester, M., & Larkin, J. (2008). Risk Issues and Crisis Management in Public Relations. Edisi ke-4. Kogan Page; (3) Smith, R. D. (2017). Strategic Planning for Public Relations. Edisi ke-5. Routledge; (4) Seitel, F. P. (2017). The Practice of Public Relations. Edisi ke-13. Pearson; (5) Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kementerian PANRB; (6) Republik Indonesia (2010). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sekretariat Negara.					
		Pendukung :					
		(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah; (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; (4) Kominfo RI. Panduan Teknis Pengelolaan Media Sosial Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022; (5) Suryanto. Pengantar Ilmu Komunikasi. Pustaka Setia, 2015.					
Dosen Pengampu		Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom.					
Modalitas dan Matakuliah prasyarat		Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan landasan regulasi kehumasan pemerintahan Indonesia serta membandingkan minimal 3 model praktik humas pemerintah yang	Mahasiswa mampu: Menjelaskan pengertian humas pemerintahan dan membedakannya dari humas korporasi berdasarkan minimal 2	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis lisan/tertulis singkat di akhir sesi: mahasiswa menjawab	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka kelas dengan kontrak perkuliahan, memaparkan peta konsep kehumasan pemerintahan menggunakan LCD, lalu	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah pengantar (15-20 menit) yang memaparkan definisi, sejarah singkat, dan fungsi humas	Bahan Kajian: - Definisi dan ruang lingkup kehumasan pemerintahan; - Perbedaan humas pemerintah dan humas	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berintegritas dan transparan.	aspek substantif • Mengidentifikasi minimal 4 fungsi strategis kehumasan di lingkungan instansi pemerintah Indonesia • Menyebutkan landasan regulasi utama kehumasan pemerintahan (PermenPAN-RB 30/2011 dan UU 14/2008) beserta pokok ketentuannya • Mengelompokkan karakteristik model humas pemerintah (press agency, public information, two-way asymmetric, two-way symmetric) sesuai konteks pemerintahan Indonesia	pertanyaan identifikasi fungsi humas dan dasar regulasi; kriteria: ketepatan konsep, kelengkapan penyebutan regulasi, dan kemampuan membedakan humas pemerintah dari humas korporasi Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons pertanyaan dosen selama diskusi pengantar; dinilai dari kualitas argumentasi, bukan sekadar frekuensi; menunjukkan kejujuran intelektual (nilai Integrity)	memfasilitasi tanya-jawab terstruktur; dosen menutup dengan penugasan reflektif (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca ringkasan materi yang dibagikan sebelum kelas dan membawa catatan pertanyaan; selama kelas mahasiswa berpartisipasi aktif dalam tanya-jawab dan diskusi kecil berpasangan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: dosen menyajikan cuplikan berita tentang krisis informasi di instansi pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia sebagai kasus pembuka; mahasiswa secara berpasangan mengidentifikasi peran humas dalam kasus tersebut, lalu hasilnya	pemerintahan Indonesia disertai infografis perbandingan empat model humas; dosen membuka forum diskusi asinkron dengan satu pertanyaan pemantik (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video kuliah dan membaca bahan bacaan yang diunggah di LMS sebelum sesi; mahasiswa merespons pertanyaan pemantik di forum diskusi dengan argumen berbasis bacaan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa diarahkan mengamati satu kasus siaran pers atau rilis berita instansi pemerintah yang tersedia secara daring, lalu mengidentifikasi model	korporasi; • Fungsi strategis humas di instansi pemerintah; • Empat model humas (Grunig dan Hunt) dalam konteks pemerintahan; • Dasar regulasi: PermenPAN-RB 30/2011 dan UU 14/2008; Pustaka: Suryanto (2015); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Ringkasan reflektif 400-500 kata: mahasiswa mendeskripsikan satu contoh nyata praktik humas instansi pemerintah di Kawasan Timur Indonesia yang mereka ketahui, dikaitkan dengan minimal satu fungsi humas dari referensi perkuliahan	dipresentasikan singkat di depan kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menulis ringkasan reflektif tentang satu praktik kehumasan nyata pada instansi pemerintah di wilayah Kawasan Timur Indonesia (dapat bersumber dari siaran pers, portal resmi instansi, atau pemberitaan media daring). Ringkasan menjelaskan: (1) nama instansi dan jenis kegiatan kehumasan; (2) fungsi humas yang dijalankan; dan (3) kesesuaiannya dengan ketentuan PermenPAN-RB 30/2011. Tugas dikumpulkan sebelum sesi Minggu 2 melalui LMS. Deliverable: Dokumen teks 400-500 kata (format PDF) diunggah ke LMS, mencantumkan tautan atau	humas yang tampak pada kasus tersebut Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sumber referensi kasus yang digunakan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tes tertulis pendek (bobot 15%): mahasiswa menganalisis satu kasus singkat praktik kehumasan pemerintah yang disediakan dosen, kemudian mengidentifikasi model yang digunakan, menilai kesesuaiannya dengan regulasi, dan mengusulkan perbaikan; kriteria penilaian: ketajaman analisis, penggunaan regulasi sebagai landasan argumen, dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi singkat tiap kelompok kecil (5-7 menit per kelompok) mengenai hasil perbandingan model humas; dosen memberikan umpan balik langsung dan menyimpulkan pola-pola yang muncul; dosen mengadministrasikan tes tertulis pendek di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa datang dengan lembar kerja komparatif yang sudah diisi; tiap kelompok mempresentasikan matriks perbandingannya dan merespons pertanyaan dari kelompok lain serta dosen MP — Metode Pembelajaran:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan analisis berupa tiga dokumen/tautan contoh praktik kehumasan dari tiga instansi pemerintah yang berbeda (pusat, daerah, dan daerah Kawasan Timur Indonesia); dosen memberikan panduan analisis komparatif melalui video singkat (10-12 menit) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempelajari tiga dokumen kasus dan panduan analisis sebelum sesi sinkron; mahasiswa mengisi lembar kerja komparatif yang diunggah di LMS sebagai persiapan diskusi	Bahan Kajian: • Model-model praktik humas pemerintah dan perbandingannya; • Prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehumasan pemerintahan; • Analisis kesesuaian praktik humas dengan UU Keterbukaan Informasi Publik; • Studi kasus kehumasan instansi pemerintah pusat dan daerah; • Penerapan PermenPAN-RB 30/2011 sebagai standar tata kelola kehumasan; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			koherensi simpulan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi kelompok kecil: dinilai dari kemampuan berargumentasi berbasis data, sikap menghargai pendapat kelompok lain (nilai Harmony), dan kejujuran mengakui keterbatasan analisis (nilai Integrity) Tugas: Matriks perbandingan 3 model praktik humas pemerintah (1 halaman A4 + narasi penjelasan 300-400 kata);	Case-Based Learning: tiap kelompok membawa kasus instansi berbeda; diskusi kelas difokuskan pada identifikasi praktik mana yang paling sesuai dengan standar PermenPAN-RB 30/2011 dan UU 14/2008, serta adaptasinya pada konteks pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Berdasarkan analisis kasus yang dilakukan selama sesi, mahasiswa menyempurnakan matriks perbandingan 3 model praktik humas pemerintah. Matriks memuat kolom: nama instansi, model humas yang dipraktikkan, dimensi integritas, dimensi transparansi, dimensi akuntabilitas, dan penilaian kesesuaian dengan regulasi. Narasi penjelasan	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menganalisis tiga kasus nyata praktik kehumasan pemerintah menggunakan lembar kerja komparatif, lalu mendiskusikan temuan awal dalam forum daring kelompok kecil (3-4 orang) sebelum dipresentasikan pada sesi sinkron Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Suryanto (2015); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Kominfo RI (2022).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			merupakan penyempurnaan dari ringkasan reflektif Minggu 1	mendesripsikan model mana yang paling relevan diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia beserta alasannya. Tugas merupakan kelanjutan langsung dari reflektif Minggu 1 dan dikumpulkan sebelum sesi Minggu 3. Deliverable: Satu file PDF berisi: matriks perbandingan (1 halaman A4 format tabel) dan narasi penjelasan 300-400 kata, diunggah ke LMS			
3,4	Sub-CPMK2: Mendeskripsikan prinsip, hierarki, dan tata aturan protokoler kenegaraan/pemerintahan sesuai UU No. 9 Tahun 2010 serta menerapkan urutan tata tempat dan tata upacara resmi pada skenario sederhana.	Mahasiswa mampu: • Mendeskripsikan minimal 5 prinsip dasar protokoler kenegaraan sesuai UU No. 9 Tahun 2010 dan PP No. 39 Tahun 2018 • Menjelaskan hierarki tata tempat pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif tertulis pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui observasi kualitas analisis skenario dalam diskusi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka regulasi keprotokolan (UU 9/2010 dan PP 39/2018) menggunakan LCD; dosen menampilkan denah/diagram tata tempat berbagai jenis acara resmi dan membahasnya bersama kelas; dosen memfasilitasi latihan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rekaman tayangan atau tautan video upacara kenegaraan resmi (misalnya upacara peringatan hari nasional) sebagai bahan analisis; dosen menyertakan panduan menonton berbasis pertanyaan analisis protokoler (via	Bahan Kajian: • Prinsip dasar keprotokolan kenegaraan dan pemerintahan; • Hierarki tata tempat pejabat negara dan pejabat pemerintah; • Ruang lingkup keprotokolan: tata tempat, tata upacara, tata	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perundang-undangan keprotokolan yang berlaku • Mengidentifikasi tiga ruang lingkup keprotokolan (tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan) beserta perbedaan fungsinya • Membedakan penerapan protokoler pada acara kenegaraan dan acara resmi pemerintahan berdasarkan contoh skenario sederhana	kelas Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan menganalisis skenario protokoler yang disajikan dosen; dinilai dari ketepatan merujuk pasal/ayat regulasi, kemampuan mengajukan pertanyaan berbasis regulasi, dan sikap tertib selama simulasi awal (nilai Service dan Harmony) Tugas: Diagram hierarki tata tempat untuk satu skenario acara resmi pemerintahan	identifikasi hierarki dari skenario sederhana (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa hasil identifikasi dari kegiatan daring; mahasiswa membaca pasal-pasal kunci PP 39/2018 yang ditunjuk dosen dan mendiskusikannya dalam kelompok kecil sebelum pembahasan pleno MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: dosen menyajikan skenario acara pelantikan pejabat daerah di Kawasan Timur Indonesia; mahasiswa dalam kelompok kecil menganalisis kesesuaian susunan tata tempat pada skenario dengan ketentuan PP 39/2018, kemudian mempresentasikan koreksi atau rekomendasi posisi	LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video upacara, mengidentifikasi unsur-unsur protokoler yang tampak (tata tempat, tata upacara, tata penghormatan), dan mencatat temuannya pada lembar panduan sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa mengamati kasus upacara nyata secara daring, mengidentifikasi elemen protokoler, lalu menelusuri dasar regulasinya melalui teks UU 9/2010 dan PP 39/2018 yang diunggah di LMS	penghormatan; • Perbedaan acara kenegaraan dan acara resmi pemerintahan; • Ketentuan UU No. 9 Tahun 2010 dan PP No. 39 Tahun 2018 tentang keprotokolan; Pustaka: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			daerah (1 halaman A4) disertai keterangan regulasi yang menjadi dasar tiap posisi; dikumpulkan sebelum Minggu 4	secara lisan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun diagram tata tempat (denah duduk) untuk satu skenario acara resmi pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia yang ditentukan dosen, misalnya rapat koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah. Setiap posisi dalam denah diberi label jabatan dan keterangan pasal/ayat PP 39/2018 yang menjadi dasar penetapan posisi tersebut. Tugas ini mempersiapkan mahasiswa untuk simulasi praktik pada Minggu 4. Deliverable: Satu file PDF berisi: denah tata tempat (1 halaman A4, dapat dibuat dengan aplikasi pengolah kata, presentasi, atau	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				gambar) dan tabel keterangan regulasi (nama jabatan, posisi, dan pasal dasar), diunggah ke LMS sebelum Minggu 4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Penilaian praktik simulasi (bobot 14%): rubrik menilai (1) ketepatan penempatan posisi pejabat sesuai hierarki regulasi, (2) kelengkapan dan urutan prosedur upacara, (3) kemampuan mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan protokoler pada skenario yang diberikan, dan (4) ketepatan tata penghormatan; setiap dimensi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menata ruang kelas/aula sebagai ruang acara resmi menggunakan podium, meja presidium, papan nama, dan bendera merah putih; dosen membagi peran (protokoler, pejabat, tamu, pengamat penilai) dan memimpin dua putaran simulasi; putaran pertama sebagai latihan dengan interupsi korektif, putaran kedua sebagai penilaian; dosen memfasilitasi debriefing kolektif di akhir (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa hadir dengan persiapan peran dari kegiatan daring; kelompok pengamat penilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video tutorial singkat (10-15 menit) tentang teknis pelaksanaan tata upacara resmi dan contoh tata penghormatan yang tepat; dosen membagikan skenario simulasi beserta daftar peran kepada mahasiswa melalui LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempelajari skenario simulasi, mempersiapkan peran yang ditugaskan, dan mengulang diagram tata tempat yang disusun pada Minggu 3 sebagai dasar persiapan simulasi	Bahan Kajian: • Prosedur pelaksanaan tata upacara resmi pemerintahan; • Teknis penerapan tata tempat berdasarkan hierarki pejabat; • Tata penghormatan dalam acara resmi kenegaraan dan pemerintahan; • Identifikasi dan koreksi kesalahan protokoler; • Standar perlengkapan dan konfigurasi ruang acara protokoler resmi; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dinilai pada skala 1-4 Partisipasi kelas & laboratorium: Keterlibatan aktif dalam peran yang ditugaskan selama simulasi (baik sebagai pelaksana protokol maupun pengamat penilai); dinilai dari ketelitian, tanggung jawab menjalankan peran, dan sikap saling menghormati antar peserta (nilai Service, Harmony) Tugas: Laporan refleksi simulasi 400-500 kata: menguraikan satu aspek tata upacara yang paling	menggunakan lembar rubrik untuk mencatat ketepatan protokoler; setelah simulasi semua mahasiswa berpartisipasi dalam debriefing mengidentifikasi aspek yang sudah benar dan yang perlu diperbaiki MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa melaksanakan proyek simulasi acara resmi pemerintahan daerah tingkat kabupaten di Kawasan Timur Indonesia secara nyata di ruang kelas yang dikonfigurasi sebagai ruang protokoler resmi; proses belajar berbasis pengalaman langsung dan umpan balik segera Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setelah simulasi, mahasiswa secara individu	luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mempelajari materi teknis secara mandiri daring sebagai persiapan proyek simulasi; mereka menyusun rencana pelaksanaan perannya masing-masing sebelum sesi tatap muka Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menantang, alasan kesulitannya, dan cara memperbaikinya dengan merujuk regulasi; dikumpulkan pasca-simulasi	menulis laporan refleksi yang mengulas pengalaman menjalankan peran dalam simulasi tata upacara resmi. Refleksi memuat: (1) deskripsi peran yang dijalankan; (2) identifikasi satu aspek tata upacara atau tata tempat yang paling menantang selama simulasi; (3) analisis penyebab kesulitan tersebut dikaitkan dengan ketentuan PP 39/2018; dan (4) rencana perbaikan konkret jika simulasi diulang. Laporan menunjukkan kemampuan evaluasi diri yang jujur sebagai cerminan nilai Integrity dan komitmen terhadap standar pelayanan protokoler (nilai Service). Deliverable: Dokumen teks 400-500 kata (format PDF) diunggah ke LMS dalam waktu 3 hari setelah sesi simulasi			
5,6	Sub-CPMK3: Mengidentifikasi dan	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	memetakan isu komunikasi publik serta pemangku kepentingan pada instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan matriks stakeholder dan analisis isu strategis.	• Mengidentifikasi minimal lima isu komunikasi publik aktual pada instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data sekunder yang tersedia • Membedakan kategori isu komunikasi publik (isu krisis, isu kebijakan, isu layanan) sesuai tingkat urgensi dan dampaknya terhadap reputasi instansi • Mengklasifikasikan pemangku kepentingan instansi pemerintah daerah ke dalam empat kuadran matriks power-interest (keep satisfied, manage closely, monitor, keep informed) • Menjelaskan hubungan antara karakteristik geografis	Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui partisipasi dan tugas pra-analisis Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelas diukur dari kemampuan menyebutkan dan membedakan jenis isu serta pemangku kepentingan secara tepat; etika diskusi menunjukkan sikap kritis namun konstruktif terhadap kasus nyata instansi pemerintah	Dosen membuka sesi dengan paparan singkat (20 menit) tentang kerangka matriks stakeholder power-interest dan teknik identifikasi isu strategis kehumasan pemerintah; dosen memfasilitasi diskusi pleno berbasis contoh kasus instansi pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia; dosen membimbing pembentukan kelompok studi kasus (4-5 mahasiswa) dan penentuan instansi sasaran analisis untuk tugas besar (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara berkelompok mendiskusikan dan mendaftar isu komunikasi publik serta pemangku kepentingan dari instansi sasaran menggunakan template matriks yang disediakan; setiap kelompok	Dosen menyajikan video kuliah singkat (15-20 menit) tentang konsep manajemen isu kehumasan pemerintah dan kerangka analisis stakeholder, dilengkapi slide interaktif yang diunggah ke LMS sebelum sesi; dosen membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemantik berbasis kasus isu nyata di pemerintah daerah Papua, NTT, atau Sulawesi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah video kuliah dan membaca regulasi terkait keterbukaan informasi publik secara mandiri sebelum sesi sinkron; mahasiswa mengisi lembar kerja digital (Google Docs bersama) untuk mendaftar isu dan pemangku kepentingan	• Konsep manajemen isu dalam kehumasan pemerintahan; • Kerangka analisis pemangku kepentingan: matriks power-interest; • Tipologi isu komunikasi publik instansi pemerintah daerah; • Karakteristik konteks komunikasi publik di Kawasan Timur Indonesia; • Kewajiban keterbukaan informasi publik sebagai landasan identifikasi isu; Pustaka: Suryanto (2015); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan sosial-budaya Kawasan Timur Indonesia dengan pola isu komunikasi publik yang muncul di instansi pemerintah daerah	Tugas: Lembar kerja identifikasi awal: daftar minimal lima isu komunikasi publik dan draf matriks stakeholder (dua halaman A4) dari satu instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia yang dipilih kelompok; dikumpulkan akhir sesi sebagai bahan tugas besar Minggu 6	mempresentasikan draf awal identifikasi isu (5 menit per kelompok) untuk mendapat umpan balik kelas; mahasiswa merevisi draf berdasarkan masukan sebelum mengembangkannya menjadi tugas besar pada Minggu 6 MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mengerjakan kasus nyata satu instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia, mengidentifikasi isu dan memetakan stakeholder menggunakan matriks power-interest sebagai fondasi analisis strategis Minggu 6 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok memilih satu instansi pemerintah	awal dari instansi yang dipilih kelompok; mahasiswa berpartisipasi dalam forum diskusi LMS dengan memberikan minimal satu respons substantif terhadap kasus yang dilemparkan dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis kasus isu komunikasi publik nyata (misalnya kasus pengelolaan informasi bencana atau isu PPID daerah terpencil di Kawasan Timur Indonesia) melalui lembar kerja kolaboratif daring sebelum menyusun draf matriks stakeholder Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				daerah di Kawasan Timur Indonesia (misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota atau Bagian Humas Sekretariat Daerah) sebagai objek studi kasus semester. Pada minggu ini, kelompok menyusun lembar kerja identifikasi awal yang memuat: (1) profil singkat instansi dan konteks geografis-sosial daerah; (2) daftar minimal lima isu komunikasi publik aktual yang dihadapi instansi, disertai kategorisasi jenis isu; (3) draf matriks stakeholder power-interest dengan minimal delapan pemangku kepentingan yang telah diklasifikasikan ke kuadran yang sesuai. Lembar kerja ini menjadi fondasi yang akan dikembangkan menjadi laporan analisis lengkap pada Minggu 6. Deliverable: Lembar kerja identifikasi awal (2			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				halaman A4, format PDF) berisi profil instansi, daftar minimal lima isu komunikasi publik berkategori, dan draf matriks stakeholder dengan minimal delapan pemangku kepentingan; dikumpulkan melalui LMS akhir sesi Minggu 5			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian formatif dilakukan melalui presentasi kelompok dengan rubrik yang mengukur ketepatan kategorisasi stakeholder (30%), kedalaman analisis isu strategis (40%), dan kualitas argumentasi berbasis data	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi panel: setiap kelompok memaparkan hasil analisis isu dan matriks stakeholder (10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab); dosen memberikan umpan balik komprehensif setelah setiap kelompok tampil, menyoroti ketepatan kategorisasi dan kedalaman analisis isu strategis; dosen merangkum pola temuan lintas kelompok di akhir sesi sebagai refleksi bersama (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan rubrik penilaian presentasi dan template laporan analisis di LMS; dosen mengunggah contoh laporan pemetaan stakeholder kehumasan pemerintah sebagai acuan standar penulisan; dosen memfasilitasi sesi konsultasi singkat (office hours daring) untuk kelompok yang memerlukan bimbingan sebelum presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Teknik analisis isu strategis dalam manajemen komunikasi publik pemerintah; • Penyusunan dan interpretasi matriks stakeholder power-interest; • Prioritisasi isu kehumasan berdasarkan urgensi dan dampak reputasi instansi; • Hubungan peta stakeholder dengan perencanaan strategi komunikasi pemerintah	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(30%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam sesi presentasi dan tanya jawab antarpanel diukur dari kemampuan memberikan pertanyaan atau tanggapan berbasis konsep yang tepat sasaran; sikap menghargai keberagaman perspektif antardaerah di Kawasan Timur Indonesia (nilai Harmony ICHSA-N) ditunjukkan dalam cara merespons paparan kelompok lain Tugas:	kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok menyajikan matriks stakeholder visual (power-interest matrix) dan narasi analisis isu strategis instansi sasarannya; kelompok pendengar memberikan pertanyaan atau catatan kritis tertulis sebagai bagian penilaian partisipasi; seluruh mahasiswa mencatat persamaan dan perbedaan pola isu antara instansi daerah yang dikaji berbagai kelompok sebagai bahan refleksi konteks Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi panel: setiap kelompok mempertanggungjawabkan produk analisis nyata di hadapan kelas sebagai	Mahasiswa melengkapi dan memfinalisasi matriks stakeholder serta analisis isu strategis berdasarkan umpan balik Minggu 5; mahasiswa menyusun slide presentasi kelompok dan mengunggahnya ke LMS sebelum jadwal sesi; mahasiswa menelaah rubrik penilaian untuk memastikan laporan memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengembangkan produk analisis nyata berupa laporan pemetaan isu dan stakeholder yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi perencanaan komunikasi instansi pemerintah daerah sasaran, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas (nilai	daerah; • Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan isu komunikasi publik; Pustaka: Suryanto (2015); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Laporan analisis isu dan matriks stakeholder instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; maksimal 10 halaman A4 (tidak termasuk lampiran); dikumpulkan melalui LMS 24 jam setelah presentasi kelas	simulasi penyampaian kajian kepada pengambil keputusan instansi pemerintah, melatih kompetensi komunikasi profesional dan integritas akademik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok mengembangkan lembar kerja Minggu 5 menjadi laporan analisis lengkap yang mencakup: (1) deskripsi konteks instansi dan latar geografis-sosial daerah di Kawasan Timur Indonesia; (2) matriks stakeholder finalisasi dengan minimal dua belas pemangku kepentingan, beserta narasi analisis karakter dan kepentingan tiap kuadran; (3) analisis isu strategis yang memprioritaskan tiga isu utama berdasarkan urgensi dan dampak reputasi, dilengkapi argumentasi	Integrity ICHSA-N) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berbasis regulasi dan data; (4) rekomendasi awal pendekatan komunikasi untuk setiap segmen stakeholder dan isu prioritas. Laporan ini juga menjadi bahan awal yang akan dilanjutkan pada audit saluran komunikasi di Minggu 7. Deliverable: Laporan analisis isu dan matriks stakeholder (maksimal 10 halaman A4, format PDF, tidak termasuk lampiran matriks visual) yang dipresentasikan di kelas dan dikumpulkan ke LMS paling lambat 24 jam setelah sesi presentasi; bobot 14% dari nilai akhir mata kuliah			
7	Sub-CPMK4: Menganalisis pengelolaan informasi publik dan kinerja kehumasan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan pendekatan manajemen strategis, mencakup	Mahasiswa mampu: • Mengevaluasi kinerja keterbukaan informasi publik instansi pemerintah daerah sasaran menggunakan instrumen audit yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat tertulis (15 menit, 5 butir isian singkat)	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menjelaskan kerangka audit komunikasi dan indikator evaluasi keterbukaan informasi publik (30 menit); dosen memandu kelas	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyajikan video kuliah (20 menit) tentang pendekatan audit komunikasi dalam manajemen strategis kehumasan pemerintah	Bahan Kajian: • Konsep dan prosedur audit komunikasi dalam manajemen strategis kehumasan pemerintah;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	evaluasi keterbukaan informasi publik dan audit saluran komunikasi.	mengacu pada standar PPID dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 • Mengaudit saluran komunikasi yang digunakan instansi (website resmi, media sosial, siaran pers, PPID) berdasarkan kriteria aksesibilitas, konsistensi pesan, dan kecepatan respons terhadap permintaan informasi • Menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual saluran komunikasi instansi dengan standar pengelolaan informasi publik yang ditetapkan regulasi, khususnya dalam konteks keterbatasan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia	mengukur pemahaman prosedur audit komunikasi dan kriteria keterbukaan informasi publik berdasarkan regulasi; kriteria: ketepatan menggunakan istilah teknis dan kemampuan mengidentifikasi indikator audit yang relevan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi hasil temuan audit diukur dari kemampuan menghubungkan data empiris saluran komunikasi dengan standar regulasi secara kritis; sikap jujur	mempraktikkan pengisian instrumen audit secara bersama menggunakan satu kasus instansi ilustrasi sebelum kelompok mengerjakan instansi sasaran masing-masing; dosen memfasilitasi diskusi pleno tentang pola kesenjangan umum yang ditemukan dalam kehumasan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok mempresentasikan temuan awal audit saluran komunikasi instansi sasarannya (7 menit per kelompok) menggunakan data yang telah dikumpulkan; kelas mendiskusikan faktor-faktor struktural (keterbatasan SDM, infrastruktur, anggaran) yang mempengaruhi kinerja komunikasi	dan cara menggunakan instrumen audit berbasis indikator PPID; dosen mengunggah template instrumen audit saluran komunikasi ke LMS untuk diunduh dan digunakan kelompok; dosen menyediakan contoh laporan audit komunikasi instansi pemerintah sebagai rujukan format penulisan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara mandiri mengakses website resmi, akun media sosial, dan portal PPID instansi sasaran untuk mengumpulkan data empiris saluran komunikasi sebelum sesi luring; mahasiswa mengisi template instrumen audit digital (Google Sheets bersama) berdasarkan data yang terkumpul; mahasiswa	• Standar keterbukaan informasi publik dan kewajiban PPID instansi pemerintah daerah; • Kriteria evaluasi saluran komunikasi: aksesibilitas, konsistensi pesan, dan responsivitas; • Analisis kesenjangan kinerja komunikasi publik dan faktor penghambat di Kawasan Timur Indonesia; • Pengelolaan media sosial pemerintah sebagai saluran komunikasi publik resmi; Pustaka: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menyusun temuan audit komunikasi dalam format laporan terstruktur yang memuat data faktual, analisis kesenjangan, dan rekomendasi perbaikan berbasis manajemen strategis kehumasan pemerintah	dalam menyampaikan temuan, termasuk kelemahan instansi yang dikaji (nilai Integrity ICHSA-N), menjadi bagian penilaian perilaku akademik Tugas: Laporan audit saluran komunikasi dan keterbukaan informasi publik instansi sasaran; maksimal 12 halaman A4 (tidak termasuk lampiran instrumen audit); dikumpulkan melalui LMS tujuh hari setelah sesi kelas sebagai persiapan cakupan evaluasi menjelang UTS	pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia; mahasiswa merevisi instrumen audit berdasarkan masukan diskusi untuk melengkapi laporan final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan analisis data empiris: kelompok menggunakan temuan audit saluran komunikasi nyata sebagai basis analisis kesenjangan, mengintegrasikan perspektif manajemen strategis dengan tuntutan regulasi keterbukaan informasi publik, serta mempertimbangkan konteks adaptabilitas daerah (nilai Adaptability ICHSA-N) dalam menyusun rekomendasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	mempelajari panduan teknis pengelolaan media sosial pemerintah sebagai acuan kriteria audit MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok melaksanakan audit nyata terhadap saluran komunikasi instansi sasaran menggunakan instrumen terstandar, menghasilkan temuan empiris yang akan dianalisis dan dilaporkan sebagai produk kajian manajemen strategis kehumasan daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Kominfo RI (2022); Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tugas: Kelompok melaksanakan audit komprehensif terhadap saluran komunikasi instansi sasaran yang telah dikaji sejak Minggu 5-6. Audit mencakup: (1) pemetaan seluruh saluran komunikasi yang digunakan instansi (website, media sosial, siaran pers, papan informasi, PPID, dan saluran lainnya); (2) evaluasi kinerja tiap saluran menggunakan instrumen audit yang memuat indikator aksesibilitas, kelengkapan informasi wajib sesuai UU KIP, konsistensi pesan, frekuensi pembaruan, dan responsivitas terhadap permintaan informasi publik; (3) analisis kesenjangan antara kondisi aktual dan standar yang dipersyaratkan regulasi, dengan mempertimbangkan konteks kapasitas daerah			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di Kawasan Timur Indonesia; (4) rekomendasi perbaikan berbasis manajemen strategis yang realistis dan terukur. Laporan ini menjadi komponen penting cakupan evaluasi menjelang UTS. Deliverable: Laporan audit saluran komunikasi dan keterbukaan informasi publik (maksimal 12 halaman A4, format PDF, tidak termasuk lampiran instrumen audit terisi dan tangkapan layar bukti data); dikumpulkan melalui LMS tujuh hari setelah sesi Minggu 7; bobot 7% dari nilai akhir mata kuliah			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester : Cakupan: Sub-CPMK1–Sub-CPMK4						
9,10	Sub-CPMK5: Merancang rencana program kehumasan pemerintahan yang komprehensif untuk satu instansi pemerintah daerah, mencakup analisis situasi, tujuan komunikasi	Mahasiswa mampu: Menganalisis situasi komunikasi instansi pemerintah daerah menggunakan pendekatan SWOT	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi lokakarya analisis situasi kehumasan dengan teknik SWOT komunikasi; membimbing kelompok	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyajikan materi perencanaan program kehumasan pemerintah melalui video sinkron atau rekaman	Bahan Kajian: Komponen perencanaan program kehumasan pemerintah: analisis situasi, tujuan, segmentasi publik,	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SMART, segmentasi publik, dan pemilihan kanal berbasis SPBE.	komunikasi secara sistematis dan berbasis data sekunder yang tersedia - Merumuskan tujuan komunikasi yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sesuai konteks kehumasan pemerintahan - Mengidentifikasi dan mensegmentasi publik sasaran instansi pemerintah daerah berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan psikografis secara tepat - Memilih kanal komunikasi pemerintah yang sesuai dengan karakteristik publik sasaran dan infrastruktur SPBE yang tersedia di	penilaian difokuskan pada kualitas analisis situasi dan kerangka perencanaan yang disusun kelompok Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif menyampaikan temuan analisis situasi dalam diskusi kelompok; menunjukkan sikap kritis dan konstruktif saat merespons presentasi kelompok lain; menjaga integritas dengan merujuk data faktual instansi pemerintah daerah yang dapat diverifikasi Tugas:	menyusun tujuan komunikasi SMART dan tabel segmentasi publik; memberikan umpan balik langsung pada draft kelompok di kelas (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok menggunakan lembar kerja analisis situasi yang telah disiapkan; mempresentasikan temuan awal analisis SWOT komunikasi OPD yang dipilih; mendiskusikan kesesuaian kanal SPBE dengan profil publik sasaran yang telah disegmentasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: lokakarya terstruktur di kelas dengan lembar kerja analisis situasi dan tabel segmentasi publik;	asinkron; memandu diskusi analisis kasus nyata profil komunikasi satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Kawasan Timur Indonesia sebagai objek studi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah profil resmi OPD yang dipilih melalui website, portal PPID, dan akun media sosial resmi sebelum sesi; mengunduh dan membaca regulasi terkait perencanaan komunikasi pemerintah; berkolaborasi dalam kelompok kecil menyusun draft analisis situasi di platform LMS MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mahasiswa	pemilihan kanal; - Teknik analisis SWOT komunikasi dalam konteks instansi pemerintah daerah; - Penyusunan tujuan komunikasi SMART untuk program kehumasan pemerintah; - Segmentasi publik sasaran instansi pemerintah: demografis, geografis, psikografis; - Pemilihan kanal komunikasi berbasis infrastruktur SPBE dan karakteristik publik daerah; - Studi kasus profil komunikasi OPD di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Peraturan Menteri PANRB Nomor 30	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		instansi pemerintah daerah • Merancang kerangka awal rencana program kehumasan satu instansi pemerintah daerah yang mencakup empat komponen utama secara koheren dan terstruktur	Dokumen kerangka rencana program kehumasan (draft awal) mencakup: (1) ringkasan analisis situasi berbasis SWOT komunikasi, (2) tiga tujuan komunikasi SMART, (3) tabel segmentasi publik minimum tiga segmen, dan (4) matriks pemilihan kanal berbasis SPBE; panjang 4-6 halaman A4 tidak termasuk lampiran	kelompok menyusun milestone pertama proyek perencanaan program kehumasan OPD Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (3-4 mahasiswa) memilih satu OPD di wilayah Kawasan Timur Indonesia sebagai objek proyek semester. Pada minggu ini, kelompok menyusun dokumen kerangka awal rencana program kehumasan yang memuat: analisis situasi komunikasi OPD berdasarkan data sekunder yang dapat diverifikasi (website resmi, laporan tahunan, portal PPID, media sosial resmi), tiga tujuan komunikasi SMART yang relevan dengan isu komunikasi yang ditemukan, tabel segmentasi publik sasaran minimum tiga segmen dengan justifikasi, dan	memulai proyek perancangan program kehumasan untuk satu OPD nyata di daerah, dengan sesi minggu ini berfokus pada analisis situasi dan penetapan tujuan komunikasi SMART Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Kominfo RI (2022); Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				matriks pemilihan kanal komunikasi berbasis infrastruktur SPBE OPD tersebut. Kelompok menyajikan kerangka ini secara lisan selama 10 menit di kelas untuk mendapatkan umpan balik sebelum dikembangkan lebih lanjut pada Minggu 10. Deliverable: Dokumen kerangka rencana program kehumasan (draft awal) dalam format PDF, 4-6 halaman, diunggah ke LMS sebelum sesi pertemuan; disertai slide presentasi 8-10 halaman untuk paparan kelas			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian utama adalah kualitas dokumen rencana program kehumasan final	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin sesi presentasi kelompok di kelas; memberikan penilaian menggunakan rubrik Sub-CPMK5 secara transparan; memandu sesi pleno membahas keunggulan dan kelemahan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu sesi presentasi kelompok secara sinkron melalui platform video konferensi; memberikan umpan balik terstruktur menggunakan rubrik penilaian Sub-CPMK5;	Bahan Kajian: • Strategi pesan komunikasi pemerintah berbasis segmentasi publik dan tujuan SMART; • Penyusunan rencana anggaran dan jadwal	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			yang merepresentasikan capaian Sub-CPMK5 (bobot 14%) dengan rubrik: kelengkapan komponen (25%), kedalaman analisis situasi (20%), ketajaman tujuan SMART dan strategi pesan (25%), kelayakan rencana anggaran dan jadwal (15%), serta kualitas mekanisme M&E (15%) Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif dalam sesi presentasi dan tanya jawab antar kelompok; memberikan umpan balik konstruktif berbasis bukti kepada kelompok	umum rancangan yang dipresentasikan sebagai pembelajaran bersama (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok mempresentasikan rencana program kehumasan final selama 15 menit diikuti tanya jawab 10 menit; kelompok lain berperan sebagai reviewer menggunakan lembar umpan balik terstruktur; mahasiswa merevisi dokumen berdasarkan masukan yang diterima MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi dan penilaian proyek rencana program kehumasan; simulasi suasana paparan rencana kepada pemangku kepentingan dengan mahasiswa berperan sebagai pejabat humas	memfasilitasi diskusi lintas kelompok tentang strategi pesan dan mekanisme M&E (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyelesaikan dan mengunggah dokumen rencana program kehumasan final ke LMS sebelum sesi; menyimak dan mencatat umpan balik dari presentasi kelompok lain untuk bahan refleksi; mengakses contoh rencana komunikasi pemerintah yang tersedia di portal Kominfo sebagai referensi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: sesi presentasi dan penilaian milestone akhir Sub-CPMK5; peer review antar kelompok	program kehumasan pemerintah daerah; • Mekanisme monitoring dan evaluasi program kehumasan: indikator kinerja terukur; • Integrasi komponen perencanaan menjadi dokumen rencana program kehumasan yang utuh; • Standar dokumen perencanaan komunikasi pemerintah sesuai peraturan perundangan; • Presentasi dan pertanggungjawaban rencana program kehumasan kepada pemangku kepentingan; Pustaka: Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lain; menampilkan sikap adaptif dalam merespons masukan reviewer dan merevisi rencana secara terbuka Tugas: Dokumen rencana program kehumasan final untuk satu OPD, mencakup tujuh komponen lengkap; panjang 10-15 halaman A4 tidak termasuk lampiran, format PDF; disertai slide presentasi untuk sesi penilaian	yang bertanggungjawabkan rencana kerjanya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan dokumen kerangka rencana program kehumasan dari Minggu 9 menjadi dokumen final yang lengkap. Dokumen final harus memuat tujuh komponen: (1) analisis situasi komunikasi OPD berbasis SWOT, (2) tujuan komunikasi SMART, (3) tabel segmentasi publik sasaran, (4) matriks kanal komunikasi berbasis SPBE, (5) strategi pesan per segmen publik, (6) rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan per semester, (7) mekanisme monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja terukur. Dokumen ini merupakan tagihan utama	menggunakan rubrik terstruktur untuk mengembangkan kemampuan evaluasi kritis Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Tahun 2008; Kominfo RI (2022); Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sub-CPMK5 yang dinilai dengan bobot 14%. Setiap anggota kelompok menuliskan refleksi individu satu paragraf tentang kontribusi pribadinya dan pelajaran yang diperoleh dari proses perencanaan. Deliverable: Dokumen rencana program kehumasan final (PDF, 10-15 halaman); slide presentasi (10-12 slide); lembar refleksi individu masing-masing anggota (satu paragraf per orang); semua dikumpulkan di LMS paling lambat H-1 sebelum sesi presentasi			
11,12,13	Sub-CPMK6: Memproduksi naskah siaran pers, konten media sosial pemerintah, dan bahan komunikasi publik digital yang memenuhi kaidah jurnalistik pemerintahan, etika komunikasi, serta estetika	Mahasiswa mampu: • Menganalisis struktur dan kaidah penulisan siaran pers pemerintahan berdasarkan prinsip jurnalistik (5W+1H) dan format baku	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian berbasis portofolio produk komunikasi dengan kriteria:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi workshop penulisan siaran pers dan produksi konten media sosial di kelas; melakukan review berpasangan atas draft naskah yang dibuat mahasiswa; menjelaskan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyajikan materi kaidah jurnalistik pemerintahan dan panduan teknis pengelolaan media sosial instansi melalui video sinkron; menampilkan analisis komparatif	Bahan Kajian: • Kaidah jurnalistik pemerintahan: struktur piramida terbalik, unsur 5W+1H, nilai berita dalam konteks humas pemerintah;	22

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kreatif sesuai identitas visual instansi.	instansi pemerintah • Memproduksi naskah siaran pers untuk satu peristiwa atau kebijakan pemerintah yang memenuhi kriteria: nilai berita tinggi, akurasi faktual, bahasa formal-komunikatif, dan identitas visual instansi • Mengidentifikasi karakteristik platform media sosial pemerintah (Instagram, Twitter/X, YouTube, TikTok) dan kesesuaiannya dengan segmen publik yang telah dianalisis pada Sub-CPMK5 • Memproduksi konten media sosial pemerintah untuk minimum dua platform berbeda yang sesuai dengan panduan teknis Kominfo dan identitas	struktur dan kelengkapan siaran pers (30%), kualitas bahasa dan nilai berita (25%), kesesuaian konten media sosial dengan platform dan identitas visual instansi (30%), penerapan etika komunikasi pemerintah (15%) Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif berdiskusi dalam workshop produksi; memberikan umpan balik peer yang konstruktif pada naskah rekan; menunjukkan kreativitas dalam penyajian konten sekaligus menjaga integritas informasi sesuai	identitas visual instansi dan cara penerapannya pada bahan komunikasi digital (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan draft siaran pers di kelas menggunakan laptop; melakukan peer review naskah menggunakan lembar cek kaidah jurnalistik yang disediakan dosen; merancang caption dan konsep visual konten media sosial untuk dua platform berbeda sesuai OPD proyek kelompoknya MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dan Project-Based Learning terintegrasi: workshop produksi siaran pers berbasis kasus peristiwa OPD nyata, dilanjutkan perancangan konten media sosial sebagai lanjutan	siaran pers berbagai OPD sebagai contoh baik dan contoh yang perlu diperbaiki (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah minimum tiga siaran pers resmi OPD (dapat diunduh dari website pemerintah atau portal PPID) sebelum sesi; mempelajari panduan teknis pengelolaan media sosial instansi pemerintah dari Kominfo; mendraft naskah siaran pers secara mandiri di platform LMS MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kasus siaran pers dan konten media sosial pemerintah yang sudah dipublikasikan, mengidentifikasi kekuatan dan	• Format dan struktur baku siaran pers instansi pemerintah; • Karakteristik platform media sosial pemerintah: Instagram, Twitter/X, YouTube, TikTok; • Panduan teknis pengelolaan media sosial instansi pemerintah sesuai ketentuan Kominfo; • Identitas visual instansi pemerintah dan penerapannya pada bahan komunikasi digital; • Etika komunikasi pemerintah: akurasi, netralitas ASN, perlindungan privasi, transparansi informasi publik; Pustaka: Kominfo RI (2022); Peraturan Menteri	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		visual instansi • Menerapkan etika komunikasi pemerintah dalam setiap produk tulisan: tidak menyebarkan informasi tidak terverifikasi, menjaga netralitas ASN, dan menghormati hak privasi publik	nilai ICHSA-N Tugas: Satu naskah siaran pers (400-600 kata) dan dua rancangan konten media sosial untuk platform berbeda (dilengkapi caption dan rekomendasi produk mengacu pada OPD yang sama dari proyek Sub-CPMK5	proyek kehumasan yang dibangun sejak Minggu 9 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap mahasiswa secara individual memproduksi bahan komunikasi publik untuk OPD yang sama dengan proyek kelompoknya. Bahan komunikasi mencakup: (1) satu naskah siaran pers (400-600 kata) yang meliputi satu peristiwa atau kebijakan nyata OPD tersebut, menggunakan struktur piramida terbalik, memenuhi unsur 5W+1H, menggunakan bahasa formal-komunikatif, dan dilengkapi informasi kontak narahubung humas; (2) dua rancangan konten media sosial untuk dua platform berbeda (misalnya Instagram dan Twitter/X) berupa caption lengkap dengan tagar yang relevan dan deskripsi	kelemahannya berdasarkan kaidah jurnalistik dan panduan Kominfo, lalu memproduksi versi yang disempurnakan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	PANRB Nomor 30 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				konsep visual (bukan desain grafis aktual). Semua produk harus konsisten dengan tujuan komunikasi dan identitas instansi yang telah dirumuskan pada Sub-CPMK5. Mahasiswa menyertakan catatan singkat (100-150 kata) yang menjelaskan pilihan nilai berita dan platform yang digunakan. Deliverable: Satu file PDF berisi: naskah siaran pers (400-600 kata), dua rancangan konten media sosial lengkap dengan caption dan deskripsi konsep visual, serta catatan justifikasi pilihan; dikumpulkan di LMS sebelum sesi minggu berikutnya			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin sesi pameran portofolio di kelas menggunakan format gallery walk; memfasilitasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi pameran portofolio digital secara sinkron; memandu diskusi kelas	Bahan Kajian: • Integrasi bahan komunikasi publik lintas format dan platform dalam satu paket	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			portofolio komunikasi publik digital dengan kriteria: kelengkapan dan variasi jenis produk minimum tiga format (25%), konsistensi identitas visual dan pesan kunci antar produk (25%), kualitas bahasa, kaidah jurnalistik, dan etika komunikasi (25%), kualitas justifikasi pemilihan kanal dan format dalam laporan portofolio (25%) Partisipasi kelas & laboratorium: Berperan aktif dalam sesi pameran portofolio dan peer review;	diskusi pleno tentang strategi komunikasi lintas platform yang efektif; merangkum pembelajaran Sub-CPMK6 dan mengaitkannya dengan persiapan materi UAS (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok memajang dan mempresentasikan portofolio komunikasi digital selama 10 menit; mahasiswa lain melakukan gallery walk dan mengisi lembar peer review terstruktur; sesi diakhiri dengan refleksi bersama tentang integrasi pesan kunci dan konsistensi identitas visual lintas format MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan format gallery walk: simulasi situasi	tentang konsistensi pesan dan identitas visual lintas platform; memberikan umpan balik terstruktur per kelompok berdasarkan rubrik Sub-CPMK6 (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunggah paket portofolio ke LMS sebelum sesi; menelaah portofolio dua kelompok lain menggunakan rubrik peer review yang disediakan; menyiapkan presentasi singkat 5 menit untuk memaparkan keputusan kreatif yang diambil dalam produksi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: pameran dan peer review portofolio komunikasi digital; mahasiswa berperan sebagai tim humas digital OPD yang	komunikasi kohesif; • Estetika kreatif dan identitas visual instansi pemerintah: prinsip konsistensi visual pada bahan komunikasi digital; • Produksi infografis dan konten video pendek untuk komunikasi pemerintah; • Konsistensi narasi dan pesan kunci instansi lintas platform komunikasi digital; • Evaluasi dan peer review produk komunikasi publik berbasis rubrik kaidah jurnalistik dan etika komunikasi; • Penyusunan portofolio komunikasi digital humas pemerintah yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memberikan umpan balik spesifik dan berbasis rubrik; menampilkan sikap terbuka menerima kritik dan kemampuan adaptif merevisi produk, mencerminkan nilai Adaptability dan Creativity dalam ICHSA-N Tugas: Paket portofolio komunikasi digital mencakup minimum tiga jenis produk terintegrasi dan laporan justifikasi; total produk komunikasi tidak melebihi 10 halaman ekuivalen atau 5 menit durasi video; laporan	pemaparan paket komunikasi humas kepada atasan atau mitra media, di mana tim humas harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kreatif dan editorial yang diambil Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mengintegrasikan produk individual dari Minggu 11 menjadi satu paket portofolio komunikasi publik digital yang kohesif untuk OPD proyek. Paket portofolio mencakup: (1) satu siaran pers final yang telah direvisi berdasarkan umpan balik Minggu 11, (2) minimum dua konten media sosial untuk platform berbeda yang saling melengkapi, (3) satu produk komunikasi digital tambahan pilihan kelompok (infografis satu halaman, skrip video pendek 60-90 detik, atau	mempresentasikan paket komunikasi kepada calon pemangku kepentingan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Kominfo RI (2022); Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			justifikasi 300-500 kata	poster digital) yang konsisten dengan pesan kunci OPD. Semua produk harus menunjukkan konsistensi identitas visual, narasi, dan pesan kunci instansi. Kelompok menyusun laporan justifikasi (300-500 kata) yang menjelaskan strategi integrasi pesan lintas format dan platform, pilihan estetika visual, serta keterkaitan paket komunikasi ini dengan rencana program kehumasan yang dirancang pada Sub-CPMK5. Portofolio ini menjadi bagian dari tagihan penilaian Sub-CPMK6. Deliverable: Satu folder digital berisi: siaran pers final (PDF), minimum dua konten media sosial (PDF atau format digital), satu produk tambahan pilihan, dan laporan justifikasi (300-500 kata); dikompilasi dalam satu file ZIP atau tautan folder			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				cloud dan diunggah ke LMS sebelum sesi pameran			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui review produk akhir paket komunikasi digital yang mencakup kesesuaian struktur jurnalistik, konsistensi identitas visual, ketepatan pesan berbasis segmentasi publik, dan pemenuhan standar etika komunikasi pemerintah	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan presentasi singkat analisis komparatif tiga contoh paket komunikasi pemerintah (baik dan buruk) menggunakan LCD proyektor; memfasilitasi sesi produksi terbimbing di kelas, berkeliling memberi umpan balik langsung kepada tiap kelompok; menutup dengan sesi galeri produk (gallery walk) dan peer review terstruktur (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok menggunakan laptop/smartphone masing-masing untuk memproduksi konten secara langsung di kelas; melaksanakan peer review dengan mengisi rubrik	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah contoh paket komunikasi publik digital instansi pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, NTT, Papua) sebagai bahan studi kasus ke LMS; menyelenggarakan sesi synchronous via video conference untuk briefing tugas produksi dan demonstrasi alat desain digital (Canva for Government/template resmi) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh contoh kasus, mempelajari Panduan Teknis Pengelolaan Media Sosial Instansi Pemerintah (Kominfo)	Bahan Kajian: • Integrasi produk komunikasi publik lintas format dalam satu paket komunikasi kohesif; • Produksi konten media sosial pemerintah: teks, infografis, dan video pendek sesuai panduan Kominfo; • Penyusunan siaran pers berstandar jurnalistik dengan identitas visual instansi; • Etika komunikasi publik digital dan kepatuhan pada pedoman pengelolaan media sosial pemerintah; • Estetika kreatif dan konsistensi identitas visual dalam komunikasi	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi peer review: memberikan umpan balik konstruktif menggunakan rubrik terstruktur, menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, dan berkontribusi pada diskusi perbaikan produk kelompok lain secara kritis dan beretika Tugas: Paket komunikasi publik digital terintegrasi per kelompok (3-4 mahasiswa) terdiri atas: (1) satu siaran pers 400-600 kata, (2) tiga konten media sosial dalam	penilaian tertulis untuk produk kelompok lain; mempresentasikan draf produk secara singkat (5 menit per kelompok) untuk mendapat masukan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan gallery walk: tiap kelompok memajang draf paket komunikasi digital (print out dan tampilan layar), kelompok lain menilai menggunakan rubrik berbasis kriteria jurnalistik, estetika, dan etika komunikasi pemerintah; dosen memfasilitasi sintesis umpan balik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok memilih satu isu atau program aktual dari instansi pemerintah daerah di	2022) secara mandiri, kemudian berkolaborasi dalam breakout room untuk menyusun pembagian peran produksi dalam kelompok MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa memproduksi secara kolaboratif paket komunikasi digital bertema isu aktual pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia, dengan pembagian peran penulis siaran pers, desainer konten, dan editor video dalam satu tim produksi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	pemerintahan; Pustaka: Kominfo RI (2022); Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 (2011); Suryanto (2015).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			format berbeda (caption Instagram/X, infografis satu halaman A4, naskah video reels 60 detik), dan (3) satu lembar panduan identitas visual yang digunakan; seluruh produk dikumpulkan dalam satu folder digital berformat PDF/PNG/MP4	Kawasan Timur Indonesia (dapat berupa program pembangunan, layanan publik, atau kebijakan daerah) sebagai konteks produksi. Kelompok memproduksi paket komunikasi publik digital terintegrasi yang terdiri atas siaran pers, tiga jenis konten media sosial, dan panduan identitas visual. Seluruh produk harus mencerminkan konsistensi pesan, kepatuhan pada kaidah jurnalistik pemerintahan, estetika kreatif, serta etika komunikasi publik sesuai Pedoman Kominfo 2022. Proses produksi didokumentasikan dalam lembar refleksi singkat (150-200 kata) yang menjelaskan keputusan kreatif dan etika yang dipertimbangkan selama proses, sebagai bentuk internalisasi nilai integritas dan kreativitas (Integrity, Creativity — ICHSA-N).			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Folder digital berisi: (1) satu file PDF siaran pers 400-600 kata dengan kop surat instansi fiktif, (2) tiga file konten media sosial (PNG infografis, teks caption 280 karakter, naskah video reels 60 detik dalam format DOCX/PDF), (3) satu lembar panduan identitas visual (PDF, 1 halaman), dan (4) lembar refleksi proses produksi 150-200 kata (PDF); dikumpulkan via LMS paling lambat H+3 setelah pertemuan			
14,15	Sub-CPMK7: Mengembangkan dan mempresentasikan prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berbasis digital secara lengkap — meliputi tata acara kenegaraan, skenario MC, daftar tamu undangan berprotokol, dan rencana siaran langsung — sebagai proyek akhir terintegrasi.	Mahasiswa mampu: - Menyusun rundown tata acara kenegaraan resmi secara lengkap dengan urutan prosesi, alokasi waktu, dan penempatan pejabat berdasarkan hierarki protokoler - Mengembangkan skenario naskah MC	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian difokuskan pada kelengkapan dan koherensi dokumen prosedur protokoler yang dikembangkan,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan analisis kasus video dokumentasi acara resmi pemerintahan daerah yang memiliki kekurangan protokoler (ditampilkan via LCD proyektor); memfasilitasi sesi workshop pengembangan dokumen di mana tiap kelompok	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template standar empat komponen dokumen protokoler ke LMS; menyajikan rekaman video penjelasan singkat (15-20 menit) tentang struktur tiap komponen dan referensi PP Nomor 39 Tahun 2018; membuka forum diskusi	Bahan Kajian: - Komponen prosedur protokoler acara resmi pemerintahan: rundown tata acara, skenario MC, daftar tamu, rencana siaran langsung; - Hierarki tata tempat pejabat negara dan pejabat daerah dalam acara resmi berdasarkan	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		acara resmi pemerintahan yang mencakup pembukaan, pengisian acara pokok, dan penutupan sesuai kaidah tata bahasa dan protokoler formal - Merancang daftar tamu undangan berprotokol yang memuat urutan prioritas, tata tempat duduk, dan mekanisme penyambutan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2018 - Menyusun rencana siaran langsung (live streaming) acara resmi pemerintahan yang mencakup platform, teknis siaran, pembagian tugas tim, dan manajemen interaksi publik digital - Mengintegrasikan keempat komponen (rundown, skenario MC, daftar tamu, rencana siaran	mencakup kesesuaian hierarki protokoler dengan PP Nomor 39 Tahun 2018, kelogisan alur tata acara, ketepatan skenario MC, dan kelayakan teknis rencana siaran langsung Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi studio produksi dokumen: kontribusi gagasan teknis yang terukur, kemampuan berargumentasi berdasarkan regulasi protokoler, dan sikap kolaboratif dalam pembagian peran pengembangan	mempresentasikan progres draf (10 menit per kelompok); memberikan umpan balik teknis langsung berbasis regulasi PP Nomor 39 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyempurnakan keempat komponen dokumen berdasarkan umpan balik; melakukan simulasi pembacaan skenario MC secara singkat di depan kelompok lain untuk menguji ketepatan bahasa dan alur protokoler; menyepakati skenario acara final yang akan disimulasikan penuh pada minggu ke-15 MP — Metode Pembelajaran:	asinkron untuk konsultasi teknis pengembangan dokumen per kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses template, mempelajari PP Nomor 39 Tahun 2018 secara mandiri, kemudian berkolaborasi dalam dokumen bersama (Google Docs atau platform serupa) untuk mengembangkan draf keempat komponen; mengunggah draf awal ke LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengembangkan secara kolaboratif dokumen prosedur protokoler lengkap untuk skenario acara resmi	PP Nomor 39 Tahun 2018; - Penyusunan skenario MC acara kenegaraan: kaidah bahasa, alur protokoler, dan pengelolaan waktu; - Integrasi siaran langsung digital dalam acara resmi pemerintahan: platform, teknis, dan etika siaran; - Standar dokumen protokoler yang dapat diimplementasikan dalam konteks pemerintahan daerah; Pustaka: Peraturan Pemerintah Nomor 39 (2018); Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 (2011); Kominfo RI (2022).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		langsung) ke dalam dokumen prosedur protokoler acara resmi yang kohesif dan dapat diimplementasikan	dokumen Tugas: Draf awal dokumen prosedur protokoler acara resmi pemerintahan (per kelompok) yang terdiri atas rundown tata acara (format tabel), skenario MC (naskah 600-900 kata), daftar tamu undangan berprotokol (format tabel dengan kolom prioritas, instansi, tata tempat), dan rencana siaran langsung (satu halaman teknis); seluruh komponen disatukan dalam satu dokumen PDF	Project-Based Learning dengan konsultasi terbimbing dan simulasi parsial: kelompok mempresentasikan dan mempertahankan pilihan teknis protokoler kepada dosen dan teman sejawat; dosen berperan sebagai konsultan teknis yang menguji kelogisan prosedur berdasarkan regulasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mengembangkan dokumen prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berbasis digital untuk skenario acara yang dipilih dari konteks pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia. Skenario acara harus realistis dan mencerminkan kebutuhan protokoler pemerintah daerah (bukan acara korporasi). Dokumen	pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia (misalnya: pelantikan kepala dinas, peringatan hari besar nasional di tingkat kabupaten/kota) yang akan disimulasikan pada minggu ke-15 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dikembangkan secara bertahap: draf awal dikonsultasikan pada minggu ini, kemudian disempurnakan untuk disimulasikan pada minggu ke-15. Proses pengembangan harus merujuk pada PP Nomor 39 Tahun 2018 sebagai landasan normatif dan Panduan Kominfo 2022 untuk komponen siaran langsung. Nilai harmoni dan pelayanan publik (Harmony, Service — ICHSA-N) diwujudkan melalui perancangan prosesi yang menghormati seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan kenyamanan serta aksesibilitas bagi tamu undangan. Deliverable: Satu dokumen PDF prosedur protokoler acara resmi pemerintahan yang memuat: (1) rundown tata acara dalam format tabel (kolom waktu,			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan, penanggung jawab, keterangan teknis), (2) skenario naskah MC 600-900 kata, (3) daftar tamu undangan berprotokol dalam format tabel (minimal 15 nama/jabatan fiktif dengan urutan prioritas dan tata tempat), dan (4) rencana siaran langsung satu halaman (platform, teknis, tim, manajemen interaksi); dikumpulkan via LMS sebagai draf yang akan direvisi untuk simulasi minggu ke-15			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Penilaian komprehensif proyek akhir terintegrasi mencakup: (1) kualitas dokumen protokoler final (kelengkapan, konsistensi, kepatuhan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengonfigurasi ruang kelas atau aula sebagai ruang protokoler resmi (podium, meja presidium, papan nama, bendera merah putih, sound system) sesuai standar tata ruang upacara pemerintahan; berperan sebagai penguji utama dan pengamat yang mencatat deviasi prosedur;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian simulasi final ke LMS sebelum pertemuan; membuka sesi konsultasi asinkron terakhir untuk revisi dokumen protokoler final; mengunggah panduan teknis persiapan simulasi (daftar peran, tata busana, perlengkapan yang	Bahan Kajian: • Simulasi penuh tata upacara resmi pemerintahan: integrasi rundown, MC, tata tempat, dan siaran langsung; • Evaluasi implementasi prosedur protokoler berdasarkan standar PP Nomor 39 Tahun 2018;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			regulasi — bobot 30%), (2) kualitas simulasi: ketepatan prosesi, pembawaan MC, pengelolaan tamu, dan operasional siaran langsung (bobot 50%), dan (3) kemampuan refleksi dan argumentasi saat sesi tanya jawab penguji (bobot 20%); setiap komponen dinilai menggunakan rubrik 4 level (kurang — cukup — baik — sangat baik) Partisipasi kelas & laboratorium: Kedisiplinan dalam menjalankan peran yang ditetapkan selama simulasi, ketepatan waktu	memfasilitasi sesi debriefing kolektif setelah seluruh kelompok menyelesaikan simulasi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa melaksanakan simulasi acara resmi pemerintahan secara penuh dengan pembagian peran: MC, petugas penyambutan tamu, operator siaran langsung, dan tim dokumentasi; kelompok yang tidak sedang tampil bertindak sebagai penilai peer menggunakan rubrik; setelah simulasi, setiap kelompok mempresentasikan refleksi proyek (10 menit) dan menjawab pertanyaan penguji (5 menit) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning fase pameran dan evaluasi: simulasi penuh acara resmi	dibutuhkan) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyelesaikan revisi dokumen protokoler final dan mengunggahnya ke LMS sebelum hari simulasi; melakukan latihan pembawaan MC dan pembagian peran secara mandiri atau daring; menyiapkan slide presentasi refleksi proyek MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning fase finalisasi: mahasiswa melakukan self-assessment menggunakan rubrik yang sama dengan rubrik penguji sebelum simulasi, sebagai bagian dari pengembangan kemampuan evaluasi diri yang berintegritas	• Pembawaan MC acara kenegaraan: diksi formal, pengelolaan alur, dan respons situasi tak terduga; • Operasional siaran langsung acara resmi pemerintahan: teknis dan manajemen interaksi publik digital; • Refleksi kritis proyek akhir terintegrasi: sintesis kompetensi kehumasan dan protokoler pemerintahan; Pustaka: Peraturan Pemerintah Nomor 39 (2018); Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 (2011); Kominfo RI (2022); Undang-Undang Nomor 14 (2008).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pelaksanaan setiap prosesi, sikap profesional dan penampilan formal selama simulasi, serta kualitas umpan balik peer evaluation yang diberikan kepada kelompok lain menggunakan rubrik terstruktur Tugas: Dokumen protokoler final (revisi dari minggu ke-14) dalam format PDF; lembar evaluasi peer (satu lembar per kelompok yang dinilai, menggunakan rubrik berbasis PP Nomor 39 Tahun 2018); slide presentasi refleksi 8-12 slide yang	pemerintahan sebagai demonstrasi hasil proyek akhir terintegrasi; diikuti presentasi refleksi dan sesi tanya jawab penguji; seluruh proses mencerminkan nilai pelayanan publik, keharmonisan tata acara, dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi tak terduga selama simulasi (Service, Harmony, Adaptability — ICHSA-N) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok melaksanakan simulasi penuh prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berdasarkan dokumen yang telah dikembangkan sejak minggu ke-14 dan direvisi berdasarkan umpan balik minggu ke-14. Simulasi dilaksanakan di ruang kelas atau aula yang dikonfigurasi sebagai ruang protokoler resmi	(Integrity — ICHSA-N) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			merangkum keseluruhan proses proyek dari perencanaan hingga pelaksanaan	dengan seluruh perlengkapan tata acara yang tersedia. Setiap anggota kelompok menjalankan peran teknis yang berbeda (MC, petugas penyambutan, operator siaran langsung, dokumentasi) untuk memastikan seluruh komponen prosedur protokoler terimplementasi. Setelah simulasi, kelompok mempresentasikan refleksi kritis yang mencakup: keputusan desain prosedur yang diambil, tantangan implementasi yang dihadapi, penyesuaian adaptif yang dilakukan selama simulasi, dan pembelajaran untuk peningkatan di masa depan. Refleksi ini merupakan bentuk integrasi akhir seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, menghubungkan kompetensi kehumasan dan protokoler yang telah dibangun sejak minggu			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pertama. Deliverable: Empat deliverable final: (1) dokumen protokoler final yang direvisi (PDF, diserahkan sebelum hari simulasi via LMS), (2) rekaman video simulasi berdurasi penuh (MP4, direkam oleh tim dokumentasi kelompok sendiri menggunakan smartphone), (3) slide presentasi refleksi proyek 8-12 slide (PDF/PPTX), dan (4) lembar peer evaluation yang diisi untuk kelompok lain (PDF, dikumpulkan langsung setelah sesi simulasi); seluruh file dikumpulkan via LMS maksimal H+2 setelah pertemuan			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester : Cakupan: Sub-CPMK5–Sub-CPMK7						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	10	
2	Kuis Regulasi Protokoler	10	
3	UTS	20	
4	Proyek Kehumasan Daerah	40	
5	UAS	20	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Kuis Regulasi Protokoler	UTS	Proyek Kehumasan Daerah	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	5	5	—	—	10
Sub-CPMK2	—	5	5	—	—	10
Sub-CPMK3	5	—	5	—	—	10
Sub-CPMK4	5	—	5	—	—	10
Sub-CPMK5	—	—	—	14	7	21
Sub-CPMK6	—	—	—	13	7	20
Sub-CPMK7	—	—	—	13	6	19
Bobot Komponen (%)	10	10	20	40	20	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Merancang dan Mempresentasikan Program Kehumasan Pemerintahan Terpadu beserta Prosedur Protokol Acara Resmi Digital untuk Satu Instansi Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Kehumasan Dan Protokol Pemerintahan*				
KODE	3PBIP4112	sks	3	SEMESTER	6
DOSEN PENGAMPU	Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) berbasis studi kasus instansi pemerintah daerah nyata di Kawasan Timur Indonesia					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Merancang dan Mempresentasikan Program Kehumasan Pemerintahan Terpadu beserta Prosedur Protokol Acara Resmi Digital untuk Satu Instansi Pemerintah Daerah di Kawasan Timur Indonesia					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK3: Mengidentifikasi dan memetakan isu komunikasi publik serta pemangku kepentingan pada instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan matriks stakeholder dan analisis isu strategis.					
Sub-CPMK4: Menganalisis pengelolaan informasi publik dan kinerja kehumasan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan pendekatan manajemen strategis, mencakup evaluasi keterbukaan informasi publik dan audit saluran komunikasi.					
Sub-CPMK5: Merancang rencana program kehumasan pemerintahan yang komprehensif untuk satu instansi pemerintah daerah, mencakup analisis situasi, tujuan komunikasi SMART, segmentasi publik, dan pemilihan kanal berbasis SPBE.					

Sub-CPMK6: Memproduksi naskah siaran pers, konten media sosial pemerintah, dan bahan komunikasi publik digital yang memenuhi kaidah jurnalistik pemerintahan, etika komunikasi, serta estetika kreatif sesuai identitas visual instansi. Sub-CPMK7: Mengembangkan dan mempresentasikan prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berbasis digital secara lengkap — meliputi tata acara kenegaraan, skenario MC, daftar tamu undangan berprotokol, dan rencana siaran langsung — sebagai proyek akhir terintegrasi.
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa secara berkelompok memilih satu instansi pemerintah daerah nyata di Kawasan Timur Indonesia (provinsi, kabupaten, atau kota), kemudian menganalisis kondisi kehumasan aktualnya, merancang program kehumasan komprehensif berbasis SPBE, memproduksi bahan komunikasi publik digital, dan mengembangkan prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berbasis digital — mulai dari tata acara kenegaraan hingga skenario siaran langsung — sebagai wujud integrasi seluruh kompetensi mata kuliah. Proyek ini mendorong kreativitas, integritas, dan jiwa technopreneurship kehumasan dalam konteks pelayanan publik daerah terpencil/3T.
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)
Analisis situasi kehumasan instansi daerah: audit saluran komunikasi, peta pemangku kepentingan (matriks stakeholder), dan identifikasi isu komunikasi publik strategis Evaluasi keterbukaan informasi publik menggunakan instrumen KIP (Komisi Informasi Publik) dan perbandingan ≥ 3 model praktik humas pemerintah berintegritas Rancangan program kehumasan komprehensif: tujuan SMART, segmentasi publik, pemilihan kanal berbasis SPBE, dan anggaran komunikasi indikatif Produksi bahan komunikasi publik digital: minimal 1 naskah siaran pers, 3 konten media sosial teridentifikasi visual, dan 1 infografis layanan publik Prosedur protokoler acara resmi pemerintahan berbasis digital: tata acara kenegaraan, skenario MC tertulis, daftar tamu undangan berprotokol (sesuai UU No. 9 Tahun 2010), dan rencana teknis siaran langsung (live streaming) Pitching/presentasi terpadu di hadapan panel penguji simulasi pejabat humas dan protokol pemerintah daerah
LANGKAH Pengerjaan Tugas
Langkah 1 (Mg 3–4) — Pemilihan & Orientasi Instansi: Kelompok memilih satu instansi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia, melakukan studi dokumen (perda, PPID, media sosial resmi), dan menyusun profil singkat instansi beserta justifikasi pemilihan (1–2 halaman). Langkah 2 (Mg 5–6) — Pemetaan Isu & Stakeholder: Mengidentifikasi dan memetakan isu komunikasi publik aktual menggunakan matriks stakeholder (power–interest grid) dan analisis isu strategis; luaran: matriks stakeholder terisi dan narasi analisis isu (≥ 5 isu teridentifikasi). Langkah 3 (Mg 7–8) — Audit Kehumasan & Evaluasi KIP: Menganalisis pengelolaan informasi publik dan kinerja kehumasan daerah menggunakan pendekatan manajemen strategis (SWOT komunikasi) dan instrumen audit saluran komunikasi; luaran: laporan audit kehumasan (≥ 8 halaman) disertai hasil evaluasi keterbukaan informasi publik. Langkah 4 (Mg 9–10) — Rancangan Program Kehumasan: Merancang program kehumasan komprehensif meliputi analisis situasi, tujuan komunikasi SMART, segmentasi publik, pemilihan kanal berbasis SPBE, dan anggaran indikatif; luaran: dokumen program kehumasan (≥ 12 halaman) mengacu regulasi Permenkominfo dan PP SPBE. Langkah 5 (Mg 11–12) — Produksi Bahan Komunikasi Digital: Memproduksi naskah siaran pers (≥ 400 kata, kaidah 5W+1H), 3 konten media sosial pemerintah (feed Instagram/X/Facebook) beridentifikasi visual instansi, dan 1 infografis layanan publik; setiap bahan dilengkapi catatan etika komunikasi dan sumber data. Langkah 6 (Mg 13–14) — Perancangan Prosedur Protokoler Digital: Mengembangkan prosedur protokoler acara resmi pemerintahan (pilih: pelantikan, rapat paripurna, atau upacara hari besar nasional) meliputi: rundown tata acara kenegaraan, skenario MC tertulis, daftar tamu undangan berprotokol sesuai UU No. 9 Tahun 2010, dan rencana teknis siaran langsung (platform, kru, ceklis teknis); luaran: dokumen protokoler lengkap (≥ 10 halaman). Langkah 7 (Mg 15) — Kompilasi Laporan & Latihan Pitching: Mengintegrasikan semua luaran ke dalam Laporan Final Terpadu, menyiapkan slide presentasi (≤ 20 slide), dan melakukan gladi bersih pitching internal kelompok. Langkah 8 (Mg 16/UAS) — Presentasi & Pitching Panel: Mempresentasikan proyek di hadapan panel penguji (simulasi pejabat humas dan protokol); setiap kelompok mendapat waktu 20 menit presentasi + 10 menit tanya jawab; anggota kelompok wajib menampilkan peran MC/protokoler simulasi ≥ 2 menit.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Satu paket Laporan Final Terpadu (format PDF, ≥35 halaman) yang terdiri atas: (1) Profil instansi & justifikasi, (2) Matriks stakeholder & analisis isu, (3) Laporan audit kehumasan + evaluasi KIP, (4) Dokumen program kehumasan komprehensif, (5) Bahan komunikasi publik digital (siaran pers, 3 konten media sosial, 1 infografis), (6) Dokumen prosedur protokoler acara resmi digital lengkap; ditambah slide presentasi (PDF/PPTX ≤20 slide) dan rekaman video pitching/simulasi MC berdurasi ≥5 menit (diunggah ke LMS UNISAN).

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. Analisis Situasi & Pemetaan Stakeholder (bobot 15%). Dinilai berdasarkan ketepatan pengisian matriks stakeholder (power–interest grid), kedalaman identifikasi ≥5 isu komunikasi publik strategis instansi daerah KTI, dan koherensi analisis SWOT komunikasi yang dihasilkan.

b. Audit Kehumasan & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (bobot 15%). Dinilai berdasarkan kelengkapan instrumen audit saluran komunikasi, akurasi evaluasi KIP mengacu regulasi yang berlaku, dan kualitas rekomendasi perbaikan berbasis bukti data lapangan instansi terpilih.

c. Rancangan Program Kehumasan Komprehensif (bobot 25%). Dinilai berdasarkan keterukuran tujuan SMART, ketepatan segmentasi publik, relevansi pemilihan kanal berbasis SPBE terhadap konteks instansi daerah KTI, dan kelayakan anggaran komunikasi indikatif yang diusulkan.

d. Produksi Bahan Komunikasi Publik Digital (bobot 20%). Dinilai berdasarkan pemenuhan kaidah jurnalistik pemerintahan (5W+1H, kelengkapan atribusi) pada siaran pers, konsistensi identitas visual instansi pada konten media sosial dan infografis, serta kepatuhan terhadap etika komunikasi pemerintah.

e. Dokumen Protokoler Acara Resmi Pemerintahan Berbasis Digital (bobot 15%). Dinilai berdasarkan kesesuaian rundown tata acara dengan UU No. 9 Tahun 2010, kelengkapan skenario MC tertulis, urutan tata tempat undangan yang benar, dan kelayakan teknis rencana siaran langsung yang dirancang.

f. Presentasi, Pitching, & Simulasi Protokoler (bobot 10%). Dinilai berdasarkan kejelasan penyampaian argumen, kemampuan menjawab pertanyaan panel secara substantif, dan kualitas penampilan simulasi MC/protokoler yang menunjukkan penguasaan prosedur kenegaraan secara nyata.

JADWAL PELAKSANAAN

Mg 3–4: Orientasi proyek, pembentukan kelompok (4–5 mahasiswa), pemilihan instansi daerah KTI, pengumpulan profil instansi & justifikasi
Mg 5–6: Pemetaan stakeholder dan identifikasi isu komunikasi publik; pengumpulan Laporan Antara 1 (matriks + narasi isu)
Mg 7–8: Audit kehumasan dan evaluasi KIP; pengumpulan Laporan Antara 2 (laporan audit)
Mg 9–10: Penyusunan rancangan program kehumasan komprehensif; pengumpulan Laporan Antara 3 (dokumen program)
Mg 11–12: Produksi bahan komunikasi publik digital; pengumpulan Laporan Antara 4 (siaran pers + konten media sosial + infografis)
Mg 13–14: Perancangan prosedur protokoler acara resmi berbasis digital; pengumpulan Laporan Antara 5 (dokumen protokoler)
Mg 15: Kompilasi Laporan Final Terpadu, penyiapan slide, gladi bersih pitching; pengumpulan Laporan Final ke LMS
Mg 16 (UAS): Presentasi & pitching panel + simulasi MC/protokoler; penilaian akhir oleh dua penguji

LAIN-LAIN

Final project dikerjakan secara berkelompok (4–5 mahasiswa per kelompok) dengan pembagian peran tertulis yang dilampirkan pada halaman kontribusi individu di Laporan Final; setiap anggota wajib mencantumkan kontribusi spesifik per bagian dan menandatangani pernyataan orisinalitas (nilai integritas/Integrity ICHSA-N); kelompok yang memanfaatkan narasumber praktisi humas atau protokol pemerintah daerah KTI secara etis dan dengan izin tertulis mendapat apresiasi poin kreativitas (Creativity); pengumpulan Laporan Final via LMS UNISAN paling lambat H-2 sebelum jadwal UAS — keterlambatan dikenai pengurangan 5 poin per hari; plagiasi di atas 25% (Turnitin/iThenticate) menyebabkan nilai gugur dan pengulangan tugas; instansi yang dipilih tidak boleh sama antar-kelompok dalam satu kelas, dan diutamakan instansi di daerah 3T Kawasan Timur Indonesia sebagai wujud nilai nasionalisme dan pengabdian (Nationalism & Service ICHSA-N).

DAFTAR RUJUKAN

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations* (9th ed.). Prentice Hall.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart and Winston.

Regester, M., & Larkin, J. (2008). *Risk Issues and Crisis Management in Public Relations* (4th ed.). Kogan Page.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*. Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Sekretariat Negara RI.

Solis, B. (2011). *Engage: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*. John Wiley & Sons.

5.1 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Penguasaan materi	Menguasai penuh, menjelaskan lugas & benar	Menguasai, sedikit ragu	Sebagian kurang tepat	Banyak kekeliruan
2	Organisasi & sistematika	Runtut, logis, mudah diikuti	Runtut, sedikit lompatan	Kurang runtut	Tidak terstruktur
3	Media & visual	Menarik, jelas, mendukung isi	Cukup jelas	Kurang mendukung	Tidak membantu
4	Komunikasi & bahasa tubuh	Percaya diri, kontak mata, intonasi tepat	Cukup baik	Datar/bergantung catatan	Cemas, membaca terus
5	Tanggapan pertanyaan	Menjawab tepat & meyakinkan	Menjawab memadai	Menjawab sebagian	Tidak mampu menjawab

5.2 Kuis Regulasi Protokoler (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis Regulasi Protokoler			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 Proyek Kehumasan Daerah

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Proyek Kehumasan Daerah			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi
3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep

5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

5.5 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.